

# **DISHARMONI KEBIJAKAN IMPOR BERAS THAILAND KE INDONESIA TAHUN 2014-2018**

**Oleh: Rismudarti**  
**(rismudarti05@gmail.com)**

**Pembimbing: Dr. Afrizal, S.IP, MA**

Jurusan Ilmu Hubungan International – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax 0761-63277

## **Abstract**

*This study aims to examine the Disharmonization of Thai Rice Import Policy to Indonesia 2014-2018. The research method used is qualitative research. This research is focused on discussing the Disharmonization of Thai Rice Import Policy to Indonesia in 2014-2018. Second, researchers feel the need to provide a time limit for the phenomenon or problem to be studied, namely the years 2014-2018.*

*This research uses the theory of liberalism. This research also uses the concept of international cooperation which is an important discussion in this research. The research data is obtained from books, journals, official documents and website that support the hypothesis.*

*The study concludes that the Indonesian Government's interest in importing rice is driven by several policies. That is. Rice imports were carried out because rice price continued to rise, the increase in medium rice prices in recent times was due to the lack of stock in the market. What happens in the field today is that traders receive a lot of orders for medium rice even though the stock is almost empty. The supply of rice to the warehouse is small because the harvest season occurs during the rainy season. Previously, the Ministry of Agriculture had reminded the Ministry of Trade that rice imports were not necessary because the rice reserves in the warehouses of the Public Logistics Agency (Perum Bulog) were still large and also because the National Rice Production was Sufficient for Community Rice. The rice import policy from Thailand is considered to be disharmonized because the Government's data is not precise, making it difficult to validate calculations regarding the balance of staple goods. The import policy that has occurred repeatedly shows that there is no verification system for data from the Central Statistics Agency (BPS). When conducting this audit, the BPK found that there was no synchronization of data between the district and provincial BPS.*

**Keywords: Government Policy, Disharmonization, Rice Imports**

## **Pendahuluan**

Hubungan internasional merujuk pada suatu ilmu yang membahas kaitan negara-negara di dunia yang saling berinteraksi dalam kehidupan bernegara di dunia. Setiap negara berinteraksi atas dasar yaitu kepentingan pemenuhan kebutuhan negaranya. Karena setiap negara memiliki batasan, maka perlu adanya interaksi dalam bentuk kerjasama dengan negara lain dan entitas non-negara. Dalam hubungan yang dijalin oleh setiap negara tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan salah satunya keuntungan ekonomi.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut perkiraan BPS (Badan Pusat Statistik), penduduk Indonesia pada tahun 2018 berjumlah mencapai 265 juta jiwa, meningkat dari yang semula hanya berjumlah 261 juta jiwa pada tahun 2017. Dengan seiring terjadinya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini, Indonesia harus dapat memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>BPS, *Statistik Penduduk*, dalam <https://www.bps.go.id>, diakses pada 20 Februari 2019.

Indonesia seharusnya mencontoh Thailand untuk melindungi petani lokalnya menyusul penghentian ekspor beras asal negeri Gajah Putih tersebut ke Tanah Air. Indonesia dengan julukan negara agrarisnya, sangat tergantung pada impor pangan, termasuk beras. Seharusnya, pemerintah bisa mengurangi impor beras jika memberdayakan petani lokal. Caranya, dengan membeli harga beras petani di level yang layak<sup>2</sup>.

Dalam mencukupi keperluan pangan domestik dan ketahanan pangan, supaya menghindari terjadinya krisis pangan terutama kebutuhan beras, pemerintah terpaksa mengambil tindakan kebijakan impor beras, yang pada akhirnya membuat Indonesia selalu bergantung pada pasokan beras impor. Ketergantungan terhadap impor beras juga disebabkan oleh berbagai macam kebijakan pemerintah yaitu ketidakpastian regulasi seperti privatisasi pertanian, liberalisasi pertanian, dan regulasi pertanian.<sup>3</sup>

Pencatatan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), pemerintah Indonesia mengimpor 2,25 juta ton beras senilai US \$ 1,03 miliar sepanjang 2018. Proses pengimporan dilakukan bertahap setiap bulan selama 12 bulan.

Regulasi impor beras di Indonesia dilakukan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG). Perum BULOG didirikan

tanggal 10 Mei 1967 dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet Menteri Nomor 114 / Kep / 1967. Semenjak tahun 2003, Bulog masuk sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan tugas menyediakan pangan yang terjangkau bagi penduduk daerah, mengendalikan harga pangan dan mendistribusikan produk sembako bagi masyarakat orang miskin

Aktifitas impor beras yang dilakukan oleh BULOG adalah kebijakan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan beras agar terhindar dari krisis pangan untuk mencapai ketahanan pangan.<sup>4</sup> Karena itu, pemerintah mengambil kebijakan impor beras dari berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, China, India, Pakistan, Amerika Serikat, dan Myanmar. Thailand menjadi salah satu negara yang melakukan ekspor dari produksi berasnya ke seluruh dunia. Meski terbilang kecil dibandingkan Indonesia, Thailand tetap mempertahankan kebijakan agroindustri yang memadai bagi masyarakatnya, terutama terkait pasokan beras.

Kebijakan impor beras pemerintah telah memicu kontroversi serta sejumlah plus minus di masyarakat. Masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah ini beranggapan sudah seharusnya pemerintah mengimpor beras agar tidak terjadi kelangkaan yang menimbulkan mahalannya harga beras. Sedangkan, masyarakat yang menolak pemerintah mengimpor beras merasa jika Indonesia terus melakukan impor beras maka akan membuat petani Indonesia semakin terpuruk. Namun pemerintah mengatakan kebijakan mengimpor beras dari Thailand itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan

---

<sup>2</sup> Berita Satu, *Kasus Thailand Jadi Pelajaran Kebijakan Impor Beras*, dalam <https://www.beritasatu.com/ekonomi/12092/kasus-thailand-jadi-pelajaran-kebijakan-impor-beras>, diakses pada 24 Desember 2019.

<sup>3</sup>Theresia Octastefani & Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, "The Impact Of Dependence On Rice Import Policy Towards Indonesian Food Security", *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, 2015, hal. 72.

---

<sup>4</sup> Bulog, *Sekilas*, dalam <http://www.bulog.co.id/sekilas.php>, diakses pada 26 Februari 2019.

agar tidak terjadi krisis pangan dan kelangkaan beras. Pada kenyataannya tahun 2018 Indonesia mengalami surplus sebesar 2,85 juta tetapi pemerintah masih saja mengimpor beras dan merupakan impor beras terbesar pada masa pemerintahan Jokowi.

Tahap kedua kebijakan Kementerian Perdagangan yang mengizinkan Bulag mengimpor beras sebanyak 500.000 ton memunculkan kontroversial. Protes itu diadakan oleh Kementerian Pertanian. Perbedaan data stok beras nasional antara kedua instansi tersebut menyebabkan perbedaan definisi dan kebijakan, sehingga kebijakan tidak konsisten dan pembahasan yang kompleks. Hasil pendataan terkait stok beras nasional yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian tidak sesuai karena berbedanya cara mereka melihat dan melakukan pendataan. Kementerian Pertanian meninjau data jumlah produksi beras dan Kementerian Perdagangan meninjau data situasi pasar di masa sekarang. Mengacu pada *Foreign Agriculture Service*, yang merupakan lembaga pengelola data pertanian, menunjukkan data pertanian Indonesia, khususnya beras, mengalami deviasi standar yang besar dari tahun ke tahun. Deviasi hasil pertanian dari beras tahun 2015 sebesar 21%, naik dari 24% di tahun 2016 dan 28% di tahun 2017. Semakin maraknya distribusi produk pertanian menandakan adanya permasalahan serius dalam mengelola data pertanian di Indonesia. Kerugian akan muncul dikarenakan tidak validnya data yang tersedia, yang berdampak pada kerugian konsumen, produsen, dan pengusaha.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Kompasiana, *Peran Big Data Dalam Kebijakan Impor Beras*, dalam <https://www.kompasiana.com/sanhan/5b9f2>

Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian yakni Mengapa Terjadi Disharmonisasi Kebijakan Impor Beras Thailand ke Indonesia Tahun 2014-2018?

Perspektif yang dimanfaatkan pada penulisan penelitian ini yakni perspektif Liberalisme. Perspektif liberalisme menurut Adam Smith menerapkan aktor utama adalah individu, bukan negara. Namun, liberalisme negara juga melakukan peran yang sangat penting demi tercapainya perdamaian dunia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tingkatan dan unit analisis negara-bangsa (*Nation-State*). Pada tingkat analisis ini, pemain yang memiliki andil yang penting adalah negara yang berwenang dalam mengeluarkan aturan dan kebijakan.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian pustaka. Penulis memanfaatkan metode pengumpulan data sekunder dengan metode studi pustaka pada penelitian ini, yakni memanfaatkan data pendukung yang dikumpulkan dan melakukan pengutipan pada artikel, buku, jurnal dan media lain yang berkaitan.

Pembahasan penelitian berfokus pada Disharmonisasi Kebijakan Impor Beras Thailand ke Indonesia Tahun 2014-2018. Terjadi disharmonisasi antara Kemendag dan Kementan dalam menyikapi kebijakan Impor Beras Thailand ke Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

Sektor pertanian menjadi sektor dengan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Kementerian Pertanian memandang

---

4f76ddcae58287f5066/peran-big-data-dalam-kebijakan-impor-beras?page=all, diakses pada 5 Januari 2020.

beras sebagai makanan pokok selain jagung, kedelai, daging, dan tebu untuk mencapai tingkat swasembada tertentu. Namun demikian hingga tahun 2018 Indonesia masih melakukan impor beras salah satunya dari Thailand. Kebijakan impor beras ini sendiri menimbulkan pertentangan antara institusi Negara yaitu Kemendag dan Kementan.

### **1. Data Stok Beras Kementerian Perdagangan**

Berdasarkan data empiris Direktur Perdagangan Luar Negeri Oke Nourwan, 1967-2018, Indonesia selalu mengimpor beras impor tertinggi pada 1999 yakni mencapai 4,75 juta ton. Pada 1984, saat Indonesia dianugerahi FAO Self-Reliance Award, impor masih 414,3 ribu ton. Apabila mengacu pada rata-rata data tahunan impor beras tiap era presiden, tidak ada peningkatan yang signifikan.<sup>6</sup>

Padahal, impor pada era Jokowi masih lebih rendah dibandingkan saat SBY menjabat untuk kedua kalinya. Gambaran realistik keseimbangan penawaran dan permintaan beras di Indonesia rata-rata impor 1 juta ton per tahun untuk setiap masa jabatan presiden. Di bawah ini adalah data yang menunjukkan rata-rata jumlah impor beras tahunan sejak 1993 oleh Kementerian Perdagangan.

1. 1993-1998 (lima tahun terakhir Soeharto): rata-rata 1,3 juta ton per tahun
2. 1999 -2004 (Gus Dur/ Megawati): 1,7 juta ton per tahun
3. 2004 - 2009 (SBY periode I): 468 ribu ton per tahun

4. 2009 - 2014 (SBY periode II): 1,1 juta ton per tahun

5. 2014 - 2018 (Jokowi): 1,08 juta ton per tahun

Pada tahun 2018, kebijakan impor beras tengah mengelola mengingat keputusan tersebut diambil saat terjadi kerancuan informasi beras dalam negeri. Kementerian Pertanian mengatakan pasokan beras masih mencukupi dan tidak perlu melakukan impor beras.

Kementerian Perdagangan melakukan impor beras pada tahun 2018 yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan mengenai Ekspor dan Impor Beras. Ayat (1) Pasal 17 menyebutkan bahwa impor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh perusahaan terbuka BULOG setelah mendapat izin impor dari Menteri.<sup>7</sup>

Akan tetapi, keputusan pemerintah dalam pengimporan dua juta ton beras terungkap kembali. Sengketa tersebut berupa penambahan izin impor dalam tiga tahap, mulai dari pengakuan Kementerian Perdagangan, penolakan Kementerian Pertanian, hingga posisi Bolog yang tidak bersyarat sebagai operator impor yang bersikeras tidak bersedia mengimpor beras dan berdalih dengan kepemilikan beras yang cukup. Menteri Perdagangan Engartasto Lukita mengatakan, kebijakan impor itu mengacu pada hukum permintaan dan penawaran. Mereka yakin, bahwa kebijakan impor tidak akan diambil bil seandainya stok beras cukup dan tidak adanya kenaikan harga beras.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>CNBC Indonesia, *Tim Prabowo Jujur Soal Data Impor Beras Kemendag*, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190201095921-4-53421/tim-prabowo-jujur-soal-data-impor-beras-kemendag>, diakses pada 15 Agustus 2020.

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras.

<sup>8</sup> Katadata, *Kisruh Impor Beras, Menteri Enggar Beda Sikap dengan Bulog*, dalam <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55d>

Pada rapat tahun 2017 dipimpin Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dimana pada rapat tersebut memunculkan kebijakan impor beras sebagai opsi untuk mengamankan pasokan pangan. Saat itu, JK mengatakan ada tanda-tanda rawan pangan terutama di gudang Bulog dengan beras kurang dari 1 juta ton dan harga konsumen naik 10%. Kenaikan harga beras tersebut segera direspon pemerintah dengan melakukan penyesuaian harga eceran maksimum (HET).

Pada semester I tahun 2017, berdasarkan data BKP, transfer beras sebanyak 1,27 juta ton oleh petani, angka ini di bawah tahun lalu pada semester yang sama yaitu sebanyak 1,80 juta ton. Kemudian pada semester II tahun 2017 kemampuan menyerap beras oleh Bulog hanya sebesar 884 ribu ton, turun pada semester yang sama di tahun 2016 sebesar 1,15 juta ton. Selanjutnya untuk produksi beras di 2017 meningkat sebesar 82,3 juta ton dibanding tahun 2016 sebesar 79,3 juta ton. Informasi jatuhnya stok di gudang Bulog membuat Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasushan menggelar rapat koordinasi terbatas (racortas) pada Januari 2018 di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Pada Maret 2018 diketahui bahwa cadangan beras di gudang Bulog dalam kondisi kurang dari 27 ribu ton, maka hal tersebut membuat omset pasar Bulog mencapai 291 ribu ton pada kuartal I 2018 saja. Penyerapan Bulog lebih rendah pada kuartal I 2018 hanya 247 ribu ton atau mencapai 478 ribu ton dibandingkan kuartal I 2017. Akibatnya, di bulan Maret keputusan diambil oleh pemerintah dengan

menaikkan volume impor sebesar 500 ribu ton. Engar mengatakan, solusinya adalah memenuhi tanggung jawab beras kaya beras (Rastra).

Kemudian di Bulan April, pemerintah mengadakan rakortas kembali guna menetapkan impor tambahan 1 juta ton beras. Dengan demikian, keputusan impor beras tahun 2018 sudah mencapai 2 juta ton.

Sebab, seluruh impor beras akan memasuki Oktober. Budi Waseso sudah berkali-kali menyatakan tidak mau mengimpor beras karena mendukung produksi beras petani. Akan tetapi pencernaan beras petani Bulog belum juga membaik. Pada paruh pertama 2018, konsumsi beras dalam negeri Bulog hanya mencapai 1 juta ton, menurun dibanding tahun sebelumnya.

Per Juli dan Agustus 2018, perolehan Bulog sebatas 363 ribu ton, turun 479 ribu ton lebih sedikit dari Juli dan Agustus 2017. Secara total, sejak Januari hingga Agustus 2018, Bulog menyerap 1,36 juta ton. Budi mengeluhkan bukan hanya kekhawatiran yang mengganggu pasokan beras ke petani, tapi beras impor juga dimakan di gudang kuota Bulog. Sebab, sejak Januari hingga Agustus 2018, pembelian beras impor mencapai 2,85 juta ton. Sedangkan kapasitas penyimpanan Bulog mencapai 3,9 juta ton.<sup>9</sup>

Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita mengatakan, keputusan impor itu dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga beras. Saat itu, pemerintah menduga stok yang ada tidak memenuhi permintaan pasar. Untuk itu, dalam rapat koordinasi terbatas di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian diputuskan untuk menambah kuota impor. Pasalnya, pasokan beras pada Januari 2017

---

478e93/kisruh-impor-beras-ketika-kemendag-dengan-bulog-berbeda-sikap, diakses pada 10 November 2020.

---

<sup>9</sup> Ibid.

sebanyak 34 ribu ton, dan Januari 2018 hanya 30 ribu ton. Pada Maret 2018, stok beras Bulog (CBP) negara minus 27 ribu ton. Menurut Kementerian Perdagangan, pasokan beras dari 2017-2018. Menurun.<sup>10</sup>

Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita mengatakan, harga beras naik tajam karena rata-rata pasokan beras kurang. Harga beras ukuran sedang yang lebih tinggi menyebabkan harga beras premium lebih tinggi. Oleh karena itu, impor beras harus dilakukan dengan mempertimbangkan beras adalah komoditas utama yang kestabilan harga harus terjaga. Namun, banyak pedagang beras yang merasa keputusan pemerintah tertunda. Hal ini dikarenakan, harga beras mengalami oversize kenaikan pada November 2017 lalu. Beras harus diimpor kala itu guna menjaga stabilitas harga eceran beras.

## **2. Data Stok Beras Kementerian Pertanian**

Informasi dari Kementerian Pertanian didasarkan pada luas areal pertanian. Semua yang ditanam harus diubah menjadi beras merah, lalu diubah menjadi beras. Sedangkan BBS memiliki estimasi produksi berdasarkan hasil Ubinan. Data Departemen Perdagangan biasanya diperoleh dari pedagang grosir, sehingga tidak memiliki data stok. Sedangkan menurut Bulog, data itu milik pemerintah, sehingga belum bisa mencerminkan jumlah beras di seluruh Indonesia.

Pada 2018, persediaan beras di gudang Bulog sampai di titik 2,4 juta ton. Angka ini belum termasuk 400.000 ton beras impor yang dilakukan pada bulan Oktober sehingga total stok menjadi 2,8 juta ton. Bulog memperkirakan dari total stok, kebutuhan beras kaya (rastra) hanya akan terpakai 100 ribu ton.

Sehingga, total persediaan beras di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 adalah 2,7 juta ton. Konsumsi beras merah dalam negeri yang sudah mencapai 4.000 ton per hari belum ditambah. Buas memperkirakan stok akhir menjadi 3 juta ton. Dengan perolehan beras merah pada Juni 2019 bersamaan dengan stok di akhir Desember, mereka yakin Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras.

Menurut Kementerian Pertanian, produksi gabah di Indonesia pada Januari 2018 sekitar 4,5 juta ton, kemudian dikonversi menjadi 2,83 juta ton beras. Sedangkan konsumsi nasional membutuhkan 2,5 juta ton beras per bulan. Artinya, cadangan beras masih sekitar 329 ribu ton, dan pasokan dalam negeri stabil. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, persediaan beras saat ini hanya 930 ribu ton, masih dibawah 1 juta ton, yang merupakan batas aman cadangan beras nasional. Akan tetapi, kurangnya padi nasional akan terisi pada panen Januari-Februari 2018.<sup>11</sup>

Mantan Menteri Kelautan Rizal Ramley menyampaikan kritikan langkah impor beras tersebut. Pemerintah tidak pernah melakukan antisipasi adanya persediaan beras nasional yang menyebabkan harga ecer beras naik. Persediaan beras yang aman harus 2-2,5 juta ton. Ketua Umum Bidang Koperasi Pasar Beras Sipinang Zulkifli Rasheed mengaku sudah menginformasikan kepada Menteri Pertanian bahwa rata-rata cadangan beras ada kekurangan. Tapi kemudian menteri pertanian mengatakan pengumpulan padi sudah habis. Jika datanya benar,

---

<sup>11</sup>Detik, *Impor selamatkan harga beras?*, dalam <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20180119/Impor-Selamatkan-Harga-Beras/>, diakses pada 15 Agustus 2020.

---

<sup>10</sup>Ibid.



seharusnya harga beras di pasaran tidak naik. Zulkifli mengakui, pemerintah saat ini membuka keran impor beras karena tidak ingin mengganggu ketersediaan beras dalam negeri yang dinilai berlebihan.

Rilis data beras terbaru dari BPS dengan pendekatan yang lebih akurat diharapkan menjadi faktor kunci dalam operasi impor. Dengan menggunakan metode pengambilan sampel wilayah, BPS telah merevisi luas areal persawahan menjadi 7,1 juta hektar dari sebelumnya 7,7 juta hektar dengan metode Kementerian Pertanian (Kementan). BPS memperkirakan produksi beras Indonesia akan melampaui 2,85 juta ton. Jumlah tersebut lebih kecil dari perkiraan Kementerian Pertanian yang sebesar 16,31 juta ton. Jika stok di Bulog kurang dari 1 juta ton, pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengimpor rice crane di masa mendatang karena keputusan impor harus dibuat karena batasan keputusan stok dan impor lebih kecil dari perkiraan Kementerian Pertanian sebelumnya. Presiden Persatuan Pengusaha Beras dan Beras (Parpadi), Suarto Alimoso, mengatakan surplus beras bisa tetap stabil hingga sisa tahun ini. Penting untuk memperoleh penanaman padi Bulog pada bulan Oktober-Desember. Jika ada tambahan setengahnya, dapat dilakukan stok hingga Maret saat panen selesai dan tidak membutuhkan impor.

Regulasi terkait impor beras tahun 2018 sebesar 2,2 juta ton menjadi perhitungan yang kurang memadai. Ia menilai kebijakan impor pemerintah terlalu pendek, yakni sesaat sebelum panen. Masalah keputusan jatuh tempo dimulai pada 2017 dengan Kementerian Pertanian mengumumkan tambahan produksi beras 13,03 juta ton. Surplus tersebut dihitung berdasarkan beras yang

setara dengan target produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton, namun perkiraan total konsumsi beras dalam negeri hanya 33,47 juta ton. Jadi Kementerian Pertanian yakin tidak perlu impor.

Laporan menunjukkan bahwa di wilayah Bali, Jawa, serangan larva terjadi pada pertengahan tahun 2018 yang mengakibatkan penurunan produksi padi oleh petani. Anehnya, pengiriman beras bisa dinilai dari kenaikan harga di akhir tahun 2017. Bulan Desember 2017, beras ukuran sedang memiliki harga Rp 9.526 per kilogram, dibanding Agustus Rp 8.823. Bulan Februari 2018, rata-rata beras melonjak menjadi Rp 10.215 per kg. Mengingat kenaikan harga tersebut, pemerintah memutuskan mengimpor beras untuk menambah cadangan beras nasional. Selain itu, hingga pertengahan Januari 2018, persediaan beras Bulog sekitar 994 ribu ton. Hal ini tidak sesuai dengan FAO, konsumsi beras di Indonesia seharusnya 800-1,12 juta ton, dengan perkiraan konsumsi beras 32 juta ton per tahun. Kebijakan pemerintah mengupayakan impor di Dinelia salah karena masa panen dimulai di daerah pada pertengahan Februari hingga Maret.

Menteri Pertanian sudah berulang kali menyampaikan bahwa produksi beras nasional cukup untuk mencukupi kebutuhan padi masyarakat. Kementerian Pertanian berencana meningkatkan produksi beras menjadi 49,4 juta ton tahun ini, dengan prakiraan kebutuhan penduduk sebesar 30,3 juta ton. Jadi, menurut dia, ada surplus beras hingga 19,1 juta ton. Cita-cita ini kemudian menjadi pertimbangan Amran dengan mengatakan bahwa beras dalam negeri telah mencapai tujuan swasembada. Menurut Kementerian Pertanian, pada triwulan III 2018 panen padi nasional mencapai 14,39 juta ton. Untuk

konsumsi selama tiga bulan hanya sebesar 7,5 juta ton. Kementerian Pertanian juga mengklaim kekeringan sawah periode Januari-Agustus 2018 hanya 1,34% atau 135.226 ha dari total luas tanam 10,07 ha. Sedangkan data gagal panen (kosong) sawah hanya mencapai 0,26% atau 26.438 hektar dari keseluruhan luas tanam.<sup>12</sup>

Dengan beragam kondisi tersebut, Amran menyatakan produksi padi semester kedua 2018 bisa lebih optimal. Alasannya, produktivitas padi sepanjang Januari hingga Agustus 2018 sebesar 51,92 kuintal per hektar dengan potensi kehilangan hasil gabah yang hanya 0,63% atau sebesar 314.932 ton. Sehingga menurut Kementan dampaknya masih kecil. Sedangkan untuk tahun depan, Kementerian Pertanian juga optimistis produksi beras akan tetap tinggi dengan berupaya menggenjot produksi padi hingga 84 juta ton. Optimisme ini yang kembali menegaskan sikap penolakan Kementerian Pertanian terhadap impor beras.<sup>13</sup>

### **3. Disharmonisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Impor Beras**

Keputusan pemerintah melalui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk mengimpor 500.000 ton beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pekan ini menjadi topik perbincangan publik. Hal ini banyak dipertanyakan karena bertentangan dengan misi pemerintah untuk membebaskan Indonesia dari masalah impor atau swasembada.

<sup>12</sup> Katadata, *Kisruh Impor Beras, Menteri Enggar Beda Sikap dengan Bulog*, dalam <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55d478e93/kisruh-impor-beras-ketika-kemendag-dengan-bulog-berbeda-sikap>, diakses pada 10 November 2020.

<sup>13</sup> Ibid.

Masalah impor beras seperti "penyakit kronis". Pemerintah selalu mengupayakan masalah kenaikan harga seiring dengan kelangkaan barang di pasaran jika terjadi anomali musiman dan, lebih parah lagi, perilaku spekulasi. Selain kedua masalah tersebut, beberapa pihak mengidentifikasi akar masalahnya. Masalah: rumitnya kalkulasi yang dapat diandalkan mengenai keseimbangan kebutuhan dasar.

Badan Pemeriksa Keuangan pernah melakukan audit terhadap kebijakan impor beras yang dilakukan Pemerintah pada 2014. Sebelumnya, BPK juga pernah melansir audit terhadap kebijakan impor pada 2012. Anggota IV BPK Rizal Djalil menuturkan, kebijakan impor yang terjadi berkali-kali menunjukkan bahwa tidak ada sistem verifikasi atas data Badan Pusat Statistik (BPS). Ketika melakukan audit tersebut, BPK menemukan bahwa belum ada sinkronisasi data antara BPS kabupaten dan provinsi. Selain itu, hingga akhir pemeriksaan oleh BPK, dia menyatakan tidak ada penetapan jenis dan jumlah cadangan ideal. Angka cadangan 1,52-1,82 juta ton yang dipegang oleh Kementerian Pertanian, lanjutnya, belum ditetapkan sebagai angka cadangan nasional.

Kolumnis ekonomi beras Khudori mengatakan bahwa sejumlah alat pendataan dan transformasi yang digunakan untuk menghitung statistik dasar pertanian BPS perlu diperbarui. Asumsi konsumsi beras per kapita negara 139,15 kg yang digunakan sejak 2005, juga masih menjadi misteri dan lebih merupakan kesepakatan politik. Pada Januari 2018, Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton. Keputusan impor itu kontroversial sejak awal. Transfer pesanan impor dari Peruvian Perdagangan Indonesia



ke Perum Bulag berdasarkan data beras nasional yang tidak valid

Impor beras rupanya mampu menghindari penurunan harga yang ditargetkan. Setelah jutaan beras impor masuk ke Indonesia, harga beras masih tetap tinggi, melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah (HET). Begini, pada Mei 2018 lalu, pemerintah memutuskan mengeluarkan izin impor volume kedua dengan volume maksimal 500.000 ton, dan hingga akhir 2018 volume impor beras mencapai 2,25 ton.

Perbedaan pandangan dan data antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menyebabkan ketidaksepakatan antara kedua departemen pemerintah tentang adopsi kebijakan impor beras Thailand pada tahun 2018, nyatanya impor beras ini tidak dilakukan untuk pertama kalinya. oleh pemerintah, namun baru pada tahun 2018 terjadi ketidakharmonisan dan perbedaan pendapatan antara kedua kementerian yang harus menjalankan tugasnya, kedua kementerian tersebut harus saling bersesuaian.

Kebijakan impor yang diambil oleh menteri perdagangan pada tahun 2018 juga tidak sesuai dan bertentangan dengan visi misi dan program nawacita presiden Jokowi yaitu mencapai kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis serta tidak adanya impor beras, namun kenyataannya volume impor beras tahun 2018 merupakan impor beras terbanyak pada masa kepemimpinan presiden Jokowi.

Sementara itu, di satu sisi menteri pertanian mengklaim bahwa stok beras dalam negeri surplus dan hal serupa juga diutarakan oleh direktur Bulog dimana stok beras digudang bulog masih aman sampai masa panen raya, namun menteri

perdagangan tetap mengambil keputusan impor beras dengan alasan beras yang di impor adalah beras jenis premium dan tidak ditanam di Indonesia untuk menjaga stok beras hingga masa panen raya agar tidak terjadi kenaikan harga beras dipasaran.

## Kesimpulan

Kebijakan impor beras tahun 2018 merupakan impor terbesar pada masa kepemimpinan presiden Jokowi. Thailand adalah negara pengekspor beras terbanyak selain Vietnam, Myanmar dan India. Pemilihan Thailand sebagai negara pengekspor terbanyak karena merupakan negara tetangga terdekat dan memiliki beras premium dengan mutu terbaik yang tidak diproduksi di Indonesia serta agar tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Thailand.

Kebijakan impor beras dari Thailand dinilai mengalami Disharmonisasi karena data Pemerintah belum presisi sehingga menyulitkan perhitungan valid mengenai neraca kebutuhan bahan pokok. kebijakan impor yang terjadi berkali-kali menunjukkan bahwa tidak ada sistem verifikasi atas data Badan Pusat Statistik (BPS). Ketika melakukan audit tersebut, BPK menemukan bahwa belum ada sinkronisasi data antara BPS kabupaten dan provinsi.

## Daftar Pustaka

### Jurnal:

Octastefani, Theresia & Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma. 2015. The Impact of Dependence on Rice Import Policy Towards Indonesian Food Security. *Jurnal Politik dan*

*Kebijakan Publik*. Vol. 2, No.1, h. 72.

**Website:**

Berita Satu, “Kasus Thailand Jadi Pelajaran Kebijakan Impor Beras”, dalam <https://www.beritasatu.com/ekonomi/12092/kasus-thailand-jadi-pelajaran-kebijakan-impor-beras>, diakses pada 24 Desember 2019.

BPS. “Statistik Penduduk”, dalam <https://www.bps.go.id>, diakses pada 20 Februari 2019.

Bulog. “Sekilas”, dalam <http://www.bulog.co.id/sekilas.php>, diakses pada 26 Februari 2019.

CNBC Indonesia. “Tim Prabowo Jujurlah Soal Data Impor Beras Kemendag”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190201095921-4-53421/tim-prabowo-jujurlah-soal-data-impor-beras-kemendag>, diakses pada 15 Agustus 2020.

Detik. “Impor selamatkan harga beras?”, dalam <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20180119/Impor-Selamatkan-Harga-Beras/>, diakses pada 15 Agustus 2020.

Kata Data. “Kisruh Impor Beras Ketika Kemendag dengan Bulog Berbeda Sikap”, dalam <https://katadata.co.id/berita/2018/09/20/kisruh-impor-beras-ketika-kemendag-dengan-bulog-berbeda-sikap>, diakses pada 5 Januari 2020.

Kompasiana. “Peran Big Data Dalam Kebijakan Impor Beras”, dalam <https://www.kompasiana.com/sanhan/5b9f24f76ddcae58287f5066/peran-big-data-dalam-kebijakan-impor-beras?page=all>, diakses pada 5 Januari 2020.

**Lainnya:**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras.